



KORAN	HAL
Haluan	22
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TERKAIT LHP DANA DESA

Pemda Jangan Hanya Mengawasi

TANAH DATAR, HALUAN — Bupati Tanah Datar yang diwakili Sekretaris Daerah Hardiman menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penggunaan Dana Desa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat.

Tidak hanya pemerintah daerah, Ketua DPRD Anton Yondra pun menerima laporan yang sama. Didampingi Inspektur Altri Suandi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMD-PPKB) Nofenril, Sekretaris Inspektorat Desi Rima, Kabag Humas dan Protokol

Syahril, Kabid Pengelolaan Aset BKD Budi Candra, LHP diserahkan langsung Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumbar, Pemut Aryo Wibowo di ruang kerjanya, Jumat (28/12).

“Dari LHP yang telah kita selesaikan, saat ini kita memfokuskan audit terhadap bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam membina dan mengawasi pengelolaan dana desa, bukan pada bagaimana pengelolaan keuangannya,” katanya.

“Kenapa?, Ia sebut diindikasikan desa atau nagari (Sumatera Barat), ibarat orang yang selama ini berja-

lan dikasih sepeda motor, tanpa diajari bagaimana menggunakannya, tidak diajari rambu-rambu, di sinilah tugas dan peran pemda, supaya nagarinya selamat,” ucap Aryo.

Lebih lanjut dia menyebut jika saat ini masa transisi, jadi pengawasan melibatkan beberapa pihak yang terkait, seperti BPRN, masyarakat dan BPK jika diminta. “Tolong ini ditingkatkan, jika nagari sudah mandiri dalam pengelolaan keuangan, maka cukup masyarakat yang mengawasi,” sebutnya lagi.

Dari itu Aryo minta pemerintah daerah mengajari tidak

sebatas mengawasi, ibarat anak baru belajar berjalan perlu dibimbing, sehingga nanti jika sudah besar atau mampu maka akan punya self control, mengingat anggaran nagari yang dikururkan pemerintah pusat cukup besar.

Sementara itu ditempat terpisah Kepala Dinas PMD-PPKB Tanah Datar Nofenril, mengatakan jika saat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait belum ada bidang khusus yang menangani tentang pengelolaan dana desa/nagari.

“Saat ini kita di daerah belum ada bidang khusus yang menaungi pengelolaan keuangan (dana desa), se-

mentara daerah lain sudah ada yang punya, namun kita sudah melakukan pengawasan, pendampingan bahkan memberikan materi seputar pengelolaan keuangan ini, kita langsung menjadi narasumber,” katanya.

Dia juga mengatakan jika LHP yang diterima saat ini, merupakan hasil audit dari laporan keuangan beberapa nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Dan Perwakilan BPK RI Sumbar ini memfokuskan audit tentang sejauh mana keterlibatan pemda dalam melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan kepada nagari. (h/fma)